

**BERKAT**

BERITA KHATULISTIWA

Kamis, 9 Juni 2011

## Panja Dewan Kota Bahas Opini BPK

### Pontianak, BERKAT.

Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Pontianak tetap konsen membahas hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tahun anggaran 2010.

Pasalnya, opini yang diberikan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) kepada Pemkot Pontianak adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Jadi apa yang disampaikan BPK-RI dengan WDP itu, tentu menjadi fokus pendalaman Panja DPRD," tegas Wakil Ketua Panja DPRD Kota Pontianak, H Arief Joni Prasetyo ST, kepada BERKAT, kemarin.

Atas dasar itulah, Rabu 8/6, Panja DPRD Kota Pontianak mengundang instansi terkait di lingkungan pemkot,

untuk diminta penjelasannya berkenaan dengan beberapa pengecualian dari BPK-RI.

Yang diundang Rabu kemarin, ada Asisten, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Pekerjaan Umum dan dinas-dinas terkait lainnya.

Yang jelas, menurut Arif, pihaknya tidak bisa begitu saja menyalahkan, bila ada kesalahan prinsip. Misalnya, kesalahan administrasi atau ada unsur kesengajaan, atau ada unsur korupsi. "Semya itu, kini belum menjadi kesimpulan DPRD. Tunggu saja hasil pembahsan panja," tegas Arief yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak.

Menurut dia, kalau nanti ada hal yang diperlukan penjelasan lebih lanjut, tentu setelah pembahsan oleh panja, DPRD

akan meminta BPK-RI untuk melakukan audit lanjutan terhadap laporan keuangan pemkot tahun 2010.

Tidak menutup kemungkinan, tegas Arief, pihaknya akan minta audit lanjutan terhadap laporan keuangan pemkot tahun anggaran 2010. "Yang jelas, kita masih menunggu hasil pembahasan dan pendalaman panja. Jika nanti ada hal-hal tak sinkron, tentu panja menanyakan langsung kepada SKPD," tegas politisi PKS ini.

Arief menegaskan, hasil pembahasan dan pendalaman panja terhadap opini WDP oleh BPK-RI, nantinya akan menjadi rekomendasi DPRD.

Apalagi panja tersebut dibentuk sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2010, tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI.



ARIF JONO PRASETYO

"Laporan hasil pemeriksaan (LHP), ini kan baru dari laporan keuangan. Jadi, jika ada indikasi korupsi atau tidak, tentu tetap akan menjadi rekomendasi DPRD," papar dia seraya menambahkan, kerja panja ini tidak lama hanya seminggu. (mzr)